

SKRIPSI

***MULTI TRACK DIPLOMACY* INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK
PENDIDIKAN ANAK-ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI
MALAYSIA**



ANBAR ZAHIRAH

F02 21 301

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : *Multi Track Diplomacy* Indonesia dalam Melindungi
Hak Pendidikan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Malaysia

NAMA : Anbar Zahirah

NIM : F02 21 301

PROGRAM STUDI : Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Majene, 2 Juni 2025

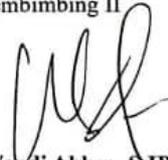
Disetujui oleh

Pembimbing I



Asma Amin, S.IP.,M.A
NIP. 198807132015042005

Pembimbing II



Wardi Abbas, S.IP..M.Hub.Int.
NIP. 199003132025061004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamein Pawantari, M. Pd
NIP. 1970013119980201005

SKRIPSI

**MULTI TRACK DIPLOMACY INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK
PENDIDIKAN ANAK-ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI
MALAYSIA**

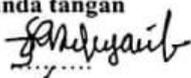
Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ANBAR ZAHIRAH
F0221301**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada 23 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1. Saomi Rizqiyanto, M.Si	Ketua Penguji	
2. Dr. Riady Ibnu Khaldun, BA.IR., M.A	Penguji Utama	
3. Danar Hafidz Adi Wardhana, M.Si	Penguji/Anggota	

Pembimbing I


Asma Amin, S.IP.,M.A
NIP. 198807132015042005

Pembimbing II


Wandi Abbas, S.IP.,M.Hub.Int.
NIP. 199003132025061004

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anbar Zahirah

NIM : F0221301

Program Studi : Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari di temukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengna hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 2 Juni 2025


METERAI
TEMPEL
DBAMX453364340 Anbar Zahirah

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesai menjadi salah satu pekerjaan yang banyak di pilih warga Indonesia dengan berbagai alasan. Salah satu negara pilihan utama PMI ialah Malaysia. banyaknya PMI di Malaysia menimbulkan masalah salah satunya terkait anak-anak mereka yang sulit mendapatkan akses pendidikan layak. Dalam mengatasi masalah ini dibutuhkan peran pemerintah dan aktor-aktor *Multi Track Diplomacy* untuk membantu memberikan akses pedidikan bagi anak-anak PMI. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini memfokuskan analisis pada empat jalur diplomasi, yakni: pemerrintah, non pemerintah/profesional, masyarakat sipil dan penelitian, pengabdian dan pendidikan. Anak-anak PMI sering kali mengalami keterbatasan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, geografis, status hukum hingga kebijakan negara penerima. Jalur pertama, Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Malaysia melalui forum *Annual Consultation*, yang menghasilkan inisiasi konkret seperti penndirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), *Community Learning Center* (CLC) dan *Indonesia Community Center* (ICC). Pemerintah juga menugaskan guru bina dan memfasilitasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke CLC. Jalur Kedua, *HUMANA*, *Sabah Bridge*, NGO PERMAI dan YPPAI memainkan peran penting dalam menjangkau anak-anak PMI di wilayah perkebunan terpencil. Mereka menyediakan layanan pendidikan, pelatihan, advokasi serta beasiswa repatriasi. Jalur Keempat, Masyarakat sipil yang terlibat melalui peran guru pamong sebagai tenaaga pendidik yang mendampingi guru bina dalam memberikan pembelajaran. Jalur Kelima, Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan melalui program KKN internasional dan pengabdian masyarakat oleh berbagai universitas di Indonesia. Dengan *Multi Track Diplomacy* Indonesia dinilai efektif dan berhasil dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia dengan peran kolaboratif aktor negara dan non-negara yang terlibat.

Kata Kunci: Multi Track Diplomacy, Pendidikan anak-anak PMI, Pekerja Migran Indonesia (PMI),

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara yang banyak mengirimkan tenaga kerja migran ke luar negeri, terutama ke Kawasan Asia Tenggara, Timur, Tengah dan negara-negara maju lainnya. Pada tahun 2024, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada bulan maret 2024 jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai angka 28.650 orang dan terus meningkat hingga pada bulan mei 2024 mencapai jumlah 30.118 orang¹.

Salah satu alasan utama yang mendorong banyaknya warga Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri adalah keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Banyaknya warga Indonesia yang memilih untuk bekerja sebagai pekerja migran menjadikan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu sektor yang telah menopang perekonomian negara melalui tingginya *remittance* atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Penerimaan dana *remittance* tersebut tidak hanya membantu perekonomian dan kehidupan keluarga pekerja migran, namun juga berperan dalam meningkatkan devisa negara². Pekerja migran menjadi sektor penyumbang devisa negara terbesar

¹ DataIndonesia and BP2MI, “Kumpulan Data Pekerja Migran Indonesia Pada 2024,” January (2025), <https://assets.dataindonesia.id/2025/01/22/1737537462393-88-PPT-Report-Kumpulan-Data-Pekerja-Migran-Indonesia-pada-2024.pdf>.

² Haryo Limanseto, “Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Optimalkan Program Government to Government,” (2022) Ekon.Go.id, .

kedua setelah sektor migas³. Data *Remittance* Indonesia menunjukkan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2024 pada triwulan II mencapai jumlah tertinggi sebanyak 387,00 juta USD⁴.

Data yang didapatkan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Malaysia merupakan negara dengan jumlah PMI terbesar ketiga didunia dan di wilayah ASEAN Malaysia menjadi negara dengan jumlah PMI yang paling besar. Pada tahun 2023 ada sebanyak 1,832.000 orang dan di tahun 2024 sebanyak 1,861.000 orang⁵. Adapun, Malaysia menjadi negara tujuan utama sebagian besar PMI disebabkan beberapa faktor yakni kedekatan wilayah dan persamaan bahasa dan budaya. Mayoritas dari PMI tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah dan keterbatasan dalam aspek ekonomi. Oleh sebab itu, persamaan dalam hal bahasa dan kedekatan geografis sangat berpengaruh dalam hal memilih malaysia menjadi negara tujuan. Pekerja tersebut mayoritas juga berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang masih memegang erat budaya dan agama, sehingga kemiripan dalam aspek budaya dan juga agama dengan Islam sebagai agama mayoritas juga mendorong keputusan tersebut.

³ Fathan Putra Santoni, "Labor Economics: Pekerja Migran Indonesia: Problematika Pahlawan Devisa Negara," (2024), <https://microdashboard.feb.ugm.ac.id/kajian-vol-6-labor-economics-pekerja-migran-indonesia-problematika-pahlawan-devisa-negara/>.

⁴ Trading Economics, "Indonesia Remittances," Trading Economics, 2024, <https://tradingeconomics.com/indonesia/remittances>.

⁵ BP2MI, "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Maret 2024," BP2MI, (2024), <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-maret-2024>.

Faktor lain yang juga mempengaruhi banyaknya PMI yang menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak serta penghasilan/gaji yang di terima lebih besar. Hal ini di tandai dengan penerapan *New Economic Policy* (NEP) di Malaysia tahun 1971-1990, yang mendukung pertumbuhan ekonomi Malaysia pada sektor-sektor industrialisasi dan ekspor⁶. Kemudian pada tahun 1980-an, sektor pertanian juga berkembang sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk bekerja di perkebunan. Dalam kondisi ini, Malaysia membutuhkan tenaga kerja lebih banyak sehingga, pengiriman Pekerja Migran Indonesia dapat menutupi kekurangan tenaga kerja di Malaysia. Kondisi inilah yang semakin menarik banyaknya PMI yang memilih Malaysia sebagai negara tujuan untuk bekerja.

Pekerja Migran Indonesia terbagi menjadi 2 yakni PMI legal/prosedural dan PMI ilegal/non prosedural. PMI legal adalah PMI yang mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah di tentukan dan memiliki dokumen-dokumen yang resmi, sedangkan PMI ilegal/non prosedural adalah pekerja migran yang masuk ke negara tujuan tidak melalui prosedur pengiriman PMI yang resmi dan tidak memiliki dokumen-dokumen keimigrasian yang resmi sehingga keberadaannya tidak diakui di negara tujuan. Keberadaan PMI ini selain memberikan manfaat bagi negara, juga memunculkan berbagai masalah terlebih dengan keberadaan PMI ilegal. Salah satu masalah yang ditimbulkan yakni terkait anak-anak mereka, karena tidak sedikit dari para PMI yang memilih untuk membawa

⁶ H Novia, "Dinamika Diplomasi Indonesia Terkait Pemenuhan Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sarawak Malaysia," *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 15, no. 2 (2023).

anggota keluarganya yang lain termasuk anaknya untuk ikut ke negara tempat mereka bekerja.

Anak-anak PMI di Malaysia banyak mengalami kesulitan sehingga tidak dapat mengakses Pendidikan yang disebabkan beberapa kendala yang dihadapi antara lain: minimnya fasilitas Pendidikan terutama bagi keluarga PMI yang tinggal di wilayah pelosok perkebunan kelapa sawit, tuntutan perekonomian juga sering kali memaksa anak-anak PMI untuk turut bekerja membantu orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga tidak adanya dokumen kependudukan bagi anak-anak PMI ilegal yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, Pendidikan anak-anak PMI menjadi hal mendesak dengan adanya larangan anak-anak PMI untuk mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Kebangsaan Malaysia oleh Pemerintah Malaysia, sehingga pilihan terakhir bagi anak-anak PMI yang ingin bersekolah adalah sekolah swasta yang biaya pendidikannya relative lebih mahal⁷. Oleh karena itu, semakin banyak anak-anak PMI yang akhirnya tidak mendapatkan hak mereka untuk menempuh pendidikan yang layak.

Terkait permasalahan ini, tentunya pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk tetap memperhatikan para pekerja migran karena bagaimanapun keadaanya status mereka masih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang artinya mereka masih menjadi tanggung jawab

⁷ Ahmad Patoni and H Muhammad, "Kebijakan Pendidikan Di Malasia Ahmad Patoni, 1 H. Muhammad 2 1.," *Jurnal Pendidikan Malaysia* 3-5-2022 (2022): 1-18.

Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memberikan hak mereka. Landasan hukum perlindungan hak-hak pekerja migran dapat dilihat dari Indonesia yang menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia “*International Convention on the Protection of The Rights of all Migrant Workers and Members of Their Familie*” pada 22 September 2004 di New York. Deklarasi tersebut dalam Pasal 26 mengatakan bahwa “*Everyone has the Rights to Education*”. Sehingga, setiap negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi setiap anak, tak terkecuali anak-anak warga negara asing yang ada di negaranya. Hak pendidikan bagi setiap anak pekerja migran telah diatur dalam Konvensi Internasional yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/45/158 pada 18 Desember 1990. Dari resolusi ini disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya⁸. Pasal 29 dan Pasal 30 menegaskan hak pendidikan bagi anggota keluarga pekerja migran, dengan Pasal 29 menyatakan bahwa “Setiap anak pekerja migran berhak atas nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan”⁹.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam membantu memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia, olehnya itu, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama-kerjasama dengan Pemerintah Malaysia dalam upaya

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya” (2012).

⁹ Mahdi Achmad Mahjud, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” (2014).

membantu anak-anak PMI memperoleh hak mereka untuk menempuh pendidikan yang layak. Namun, terkait masalah ini pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya jalan dalam upaya mengatasinya. Pemerintah dan aktor-aktor diplomasi lainnya butuh untuk melakukan kolaborasi karena banyaknya PMI di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dicapai sehingga membutuhkan usaha yang lebih besar untuk mengaksesnya. Oleh karena itu dibutuhkan banyak jalur diplomasi atau yang dikenal dengan *Multi Track Diplomacy* untuk ikut terlibat dalam upaya pemerintah dalam memberikan hak pendidikan bagi anak-anak PMI yang ada di Malaysia.

Multi Track Diplomacy memiliki 9 *track* (jalur) diantaranya: Pemerintah, non-pemerintah/*professional, bussiness, private citizen, Research, Training and Education, activism, Religious* (agama), *funding* dan media. Banyaknya aktor *Multi Track Diplomacy* dari berbagai sektor dapat membantu pemerintah yang merupakan aktor utama diplomasi dalam memberikan hak pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia namun tidak hanya dari hubungan kerjasama antar pemerintah melainkan dari sektor-sektor lainnya. Olehnya itu, penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui peran keterlibatan aktor-aktor *Multi Track Diplomacy* Indonesia dalam melindungi hak pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia.

1.2 BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi penelitian agar fokus pada tujuan penelitian dan tidak melebar ke masalah lainnya. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berfokus pada peran *multi track diplomacy* Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia dari empat jalur *Multi Track Diplomacy* yakni jalur pertama (*government/pemerintah*), jalur dua (*non-government/non pemerintah*), jalur empat (*Private Citizen/Masyarakat Sipil*) dan jalur lima (*Research, Training and Education/*Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana peran *Multi Track Diplomacy* Indonesia untuk melindungi hak pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran *Multi Track Diplomacy* Indonesia dalam melindungi hak pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai peran *Multi Track Diplomacy* Indonesia dalam melindungi hak pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi maupun referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa hubungan internasional.

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Tipe penelitian kualitatif-deskriptif merupakan tipe penelitian yang menggabungkan penelitian kualitatif dan deskriptif.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk menggambarkan, menjelaskan serta menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹⁰. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berupaya menggambarkan objek atau topik yang diteliti secara mendalam, luas, dan rinci¹¹. Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan mengenai peran aktor-aktor *Multi Track Diplomacy* Indonesia dalam melindungi hak pendidikan anak PMI di Malaysia, baik itu dalam hal kebijakan dan implementasinya, maupun hambatan-hambatan yang di hadapi.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara (*interview-based research*), *Dokument based research* dan Penelitian berbasis internet (*Internet based research*). Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan wawancara di peroleh dari hasil wawancara bersama Kepala SIKK (Sekolah Indonesia Kota Kinabalu), Koordinator Penghubung CLC wilayah KRI Tawau dan Guru Bina CLC (*Community Learning Center*).

¹⁰ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.,*” *PT Remaja Rosdakarya*, (2018).

¹¹ Ifitah Nurul Laily, ““Pengertian Penelitian Deskriptif; Ciri-Ciri; Jenis; Dan Pelaksanaannya,”” *Katadata*, (2022).

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya seperti dengan melakukan wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh orang lain) oleh peneliti dengan menggunakan media perantara. Data sekunder yang dikumpulkan berupa literatur ilmiah berupa buku, skripsi, artikel online, berita, dokumen laporan, dan lain-lain.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data kualitatif ialah identifikasi dan pencarian pola umum dalam hubungan antar kelompok data yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan. Proses dalam analisis data kualitatif dengan mengorganisir, menginterpretasi, dan menyimpulkan data yang bersifat non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman individu dalam konteks tertentu. Pada analisis data ini penulis menganalisis masalah yang dijelaskan dalam bentuk fakta dan kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya untuk kemudian menghasilkan argumentasi yang tepat. Pada penelitian ini analisis data kualitatif digunakan dalam menganalisis Indonesia dalam

melindungi hak pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia menggunakan *Multi Track Diploamcy*.

1.4.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Maret - Mei 2025. Meski demikian, data awal observasi telah penulis dapatkan dengan melakukan wawancara dengan Kepala SIKK (Sekolah Indonesia Kota Kinabalu), Koordinator Penghubung CLC wilayah KRI Tawau dan Guru Bina CLC (*Community Learning Center*).

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Secara keseluruhan, sistematika penyusunan proposal skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, analisis data, waktu dan lokasi penelitian, serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II: Telaah Konseptual. Bab ini berisi telaah konseptual dengan menggunakan konsep *Multi Tarck Diplomacy* dan tinjauan pustaka.

Bab III: Gambaran Umum. Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) anak-anak PMI di Malaysia.

Bab IV: Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini penulis akan menganalisis *Multi Track Diplomacy* Indonesia dalam melindungi hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan serta saran.

BAB II

TELAAH KONSEPTUAL DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TELAAH KONSEPTUAL

2.1.1 *Multi Track Diplomacy*

Multi Track Diplomacy atau Diplomasi banyak jalur merupakan sebuah konsep diplomasi oleh Dr. Diamond dan Jhon W. McDonald (1991)¹². *Multi Track Diplomacy* berfokus pada penciptaan solusi yang lebih inklusif dan menyeluruh dengan mempertemukan berbagai perspektif dan kepentingan yang berbeda. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada sektor formal dan memberikan kesempatan bagi berbagai pihak jalur-jalur yang berkembang dalam diplomasi modern untuk terlibat dalam proses perdamaian atau diplomasi, karena negara atau pemerintah dianggap tidak lagi efisien untuk melakukan diplomasi tanpa berkolaborasi dengan jalur lainnya.

Terjadinya perang dunia pertama (1914-1918), peristiwa runtuhnya Tembok Berlin (1989) dan Perang Dingin (1947-1991) semakin memperkuat anggapan bahwa pemerintah saja tidak dapat mewujudkan perdamaian dunia. Kemudian, pada tahun 1982 Joseph V. Montville mencetuskan konsep *Track Two* atau *nonofficial diplomacy*¹³. Montville memperkenalkan idenya dalam konteks konflik dan perdamaian, yang digunakan sebagai alternatif terhadap pendekatan diplomasi tradisional yang lebih berpusat pada negara dan sektor-

¹² Louise Diamond and John McDonald, “*Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace Third Edition*,” *Kumarian Pres* 3, no. 2003 (1996).

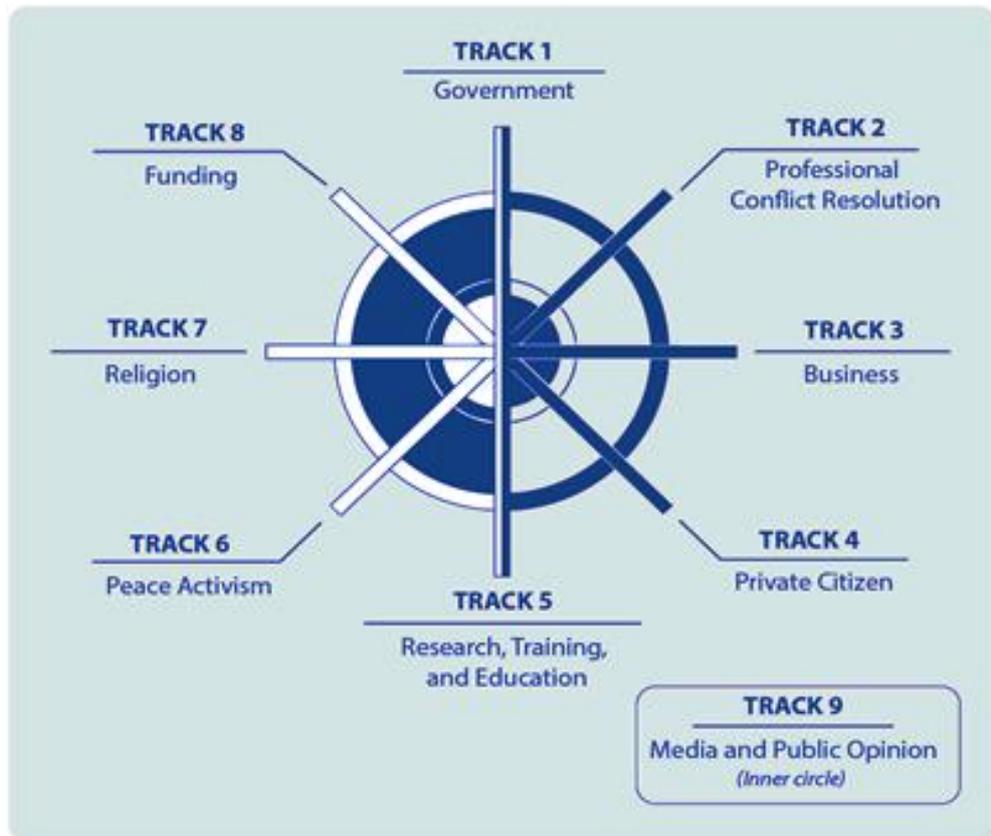
¹³ Asma Amin, Damar Hafidz Adi Wardhana, and Riady Ibnu Khaldun, *Pengantar Multi Track Diplomacy*, (2023).

sektor formal. Saat itu, konflik-konflik internasional yang terjadi semakin kompleks dan melibatkan banyak pihak baik negara maupun non-negara yang sulit di selesaikan jika hanya mengandalkan jalur diplomasi tradisional, Monville menyadari bahwa dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Dalam halaman *Foreign Policy*, Joseph V. Montville mengatakan “warga negara dapat mengambil tindakan daripada hanya menjadi pengamat sementara pemerintah yang dewasa bertindak seperti orang bodoh”. Perkembangan *track two diplomacy* ini dari pengamatan bahwa individu swasta yang bertemu secara informal bisa mencapai kesepakatan yang tidak dapat dicapai oleh negosiator resmi¹⁴.

Perkembangan selanjutnya, jalur-jalur yang sebelumnya hanya terdiri dari *track one* dan *track two*, diperluas menjadi empat jalur oleh John McDonald pada tahun 1989. Empat jalur tersebut terdiri dari *Resolution/Professionals, business, private citizens* dan *media*. Jalur-jalur ini pada dasarnya tetap dapat dikategorikan bagian dari aktor non negara. Namun spesifik lebih diperjelas aktor, bidang, cara kerja dan perannya. Kemudian pada tahun 1991, jalur yang telah ada kembali di perluas oleh Louise Diamond dan John McDonald, menjadi sembilan jalur yaitu: *religion, activism, research, training and education*, dan *philanthropy*.

¹⁴ Charles Homans, “*Track II Diplomacy: A Short History.*,” *Foreign Policy*, 2011, 187.

Gambar 2. 1 Multi Track Diplomacy



Sumber: IMTD (*Institute for Multi-Track Diplomacy*)

Seiring berjalannya waktu, *multi track diplomacy* semakin diakui sebagai satu pendekatan yang efektif untuk menangani konflik dan menciptakan peramaian yang berkelanjutan, karena pendekatan ini tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor utama namun juga melibatkan berabagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Pekerembangan diplomasi yang kemudian memunculkan *Multi Tark Diplomacy* yang memiliki sembilan jalur, yang di antaranya ialah: Jalur pertama (Pemerintah /*Government*) yang merupakan segala upaya

perdamaian dan diplomasi yang akan dilakukan melalui jalur formal pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait. Pemerintah masih tetap menjadi jalur utama karena memegang peran vital dalam diplomasi. Jalur kedua (*Non-Pemerintah / Non-government/professional*) yang merupakan upaya perdamaian dunia dan diplomasi dilakukan oleh non-pemerintah/profesional yang mencoba menganalisis, mencegah dan menyelesaikan konflik internasional.

Jalur Ketiga (*Bisnis/Business*) merupakan upaya perdamaian yang dilakukan melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Jalur keempat (*Masyarakat sipil/private citizen*) kegiatan yang dilakukan oleh individu dan masyarakat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Jalur lima (*Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan/research, training and education*) jalur ini terkait dengan 3 bidang, yaitu : Penelitian yang terdiri dari kalangan akademisi pada perguruan tinggi, pusat penelitian atau *think tank*, Pelatihan yang terdiri dari program-program pelatihan yang memberikan pembelajaran keterampilan seperti negosiasi, mediasi dan lainnya, dan yang terakhir Pendidikan, mencakup berbagai aspek studi global. Jalur enam (*Aktivis/Activism*) merupakan jalur perdamaian melalui advokasi, aktor yang berperan adalah mereka yang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Jalur Tujuh (*Agama/religious*) merupakan penciptaan perdamaian melalui keyakinan dalam tindakan. Jalur Delapan (*Pendanaan/Funding*) merupakan jalur yang mengacu pada komunitas-komunitas perdamaian dan dermawan yang memberikan dukungan finansial untuk kegiatan-kegiatan yang

mendukung diplomasi. Dan terakhir Jalur sembilan (*Media dan Komunikasi/Communication and the media*) jalur ini menggunakan media dan informasi dalam upaya perdamaian dunia sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan pendapat masukan dan kritikan yang ditujukan kepada kelompok ataupun pemerintah¹⁵.

Multi Track Diplomacy merupakan pendekatan yang efektif dalam mengatasi masalah hak pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dengan melibatkan beberapa jalur diplomasi yang terkait. Pada penelitian ini, penulis fokus pada 4 jalur sebagai jalur *Multi Track Diplomacy* diantaranya ialah Jalur Pertama (Pemerintah/Government), Jalur kedua (Non-Pemerintah/*Non-government*), Jalur lima (Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan/*Research, Training and education*) dan Jalur Sembilan (*Media dan Komunikasi/Communication and the media*).

a. Jalur pertama: Pemerintah/*Government*

Jalur pertama dalam *Multi Track Diplomacy* ini yakni segala upaya perdamaian dan diplomasi yang akan dilakukan melalui jalur formal pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait. Pemerintah masih tetap menjadi jalur utama karena memegang peran vital dalam diplomasi. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan kerjasama-kerjasama dengan pemerintah Malaysia untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak Pekerja Migran Indonesia yang ada di Malaysia.

¹⁵ *Ibid, hal.13*

b. Jalur Kedua: Non-Pemerintah/*Non-government/professional*

Dalam jalur ini, upaya perdamaian dunia dan diplomasi dilakukan oleh non-pemerintah/profesional yang mencoba menganalisis, mencegah dan menyelesaikan konflik internasional.

c. Jalur Keempat: Masyarakat Sipil/*Private Citizen*

Dalam jalur ini, menekankan peran individu dalam membangun perdamaian melalui keterlibatan pribadi. Hal ini mencakup berbagai cara di mana warga negara dalam terlibat dalam kegiatan perdamaian dan pembangunan dunia. Melalui partisipasi ini, individu dapat menjembatani kesenjangan budaya, membangun kepercayaan dan memfasilitasi dialog lintas batas yang sering kali tidak dapat dicapai melalui saluran diplomatik resmi. Jalur 4 memperluas spektrum diplomasi dengan memperdayakan warga biasa untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan stabil.

d. Jalur Kelima: Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan/*Research, Training and Education*.

Jalur lima yakni penelitian, pelatihan dan pendidikan atau perdamaian melalui pembelajaran. Jalur ini terkait dengan 3 bidang, yaitu : Penelitian yang terdiri dari kalangan akademisi pada perguruan tinggi, pusat penelitian atau *think tank*, Pelatihan yang terdiri dari program-program pelatihan yang memberikan pembelajaran keterampilan seperti

negosiasi, mediasi dan lainnya, dan yang terakhir Pendidikan, mencakup berbagai aspek studi global dari TK sampai PhD.

Multi Track Diplomacy merupakan pendekatan yang efektif dalam mengatasi masalah hak pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dengan melibatkan beberapa jalur diplomasi yang terkait. Pada penelitian ini penulis fokus dalam melihat peran *Multi Track Diplomacy* Indonesia melalui empat jalur diplomasi diantaranya yakni: jalur pertama (*government/pemerintah*), jalur dua (*non-government/non pemerintah*), jalur lima (*Research, Training and Education/*Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan) dan jalur sembilan (*Communications and the media/Media dan Komunikasi*).

2.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai acuan penelitian yang dianggap memiliki masalah yang relevan dengan yang diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, ada beberapa penelitian yang mengkaji hal yang sama namun fokus dalam hal yang berbeda yang diambil oleh penulis untuk dijadikan pembandingan dalam penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang pertama yaitu artikel yang ditulis oleh Christy Damayanti, Untari Nurulita Maydar Dewi dan Defta Galuh Permatasari (2023) dengan judul “Diplomasi pendidikan Sabah *Bridge* dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah, Malaysia”¹⁶.

¹⁶ Christy Damayanti, Untari Nurulita Madyar Dewi, and Defta Galuh Permatasari, ““*Diplomasi Pendidikan Sabah Bridge Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah, Malaysia.*”*Indonesian Journal of International Relations* 7, no. 2 (2023),

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan konsep diplomasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Sabah *Bridge* dalam melakukan diplomasi pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan diplomasi pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 hasil dari diplomasi pendidikan Indonesia melalui Sabah *Bridge* yakni: Membangun Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Malaysia yang dilakukan Pemerintah Indonesia, Indonesia dan Malaysia juga melakukan kerja sama dalam keimigrasian untuk memfasilitasi dokumen yang dibutuhkan anak PMI dan Sabah *Bridge* serta Pemerintah Indonesia memberikan beasiswa repatriasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia. Penelitian ini menguraikan bagaimana Sabah *Bridge* secara efektif terlibat dalam diplomasi pendidikan untuk mengatasi kebutuhan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia, melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi dengan badan-badan pemerintah. Upaya ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada artikel ini fokus penelitian ini hanya pada peran Sabah *Bridge* sebagai salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak PMI. Selain itu, penelitian ini juga hanya fokus pada wilayah Sabah, Malaysia. Sedangkan, penelitian yang akan peneliti lakukan akan membahas terkait *Multi Track Diplomacy* yang dilakukan

Indonesia dalam pemenuhan hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia. Penelitian ini akan membahas terkait aktor-aktor dalam *Multi Track Diplomacy* yang tidak hanya ada aktor *government* namun juga melibatkan aktor-aktor *non-government* dalam pemenuhan hak pendidikan anak PMI.

Penelitian yang kedua yaitu artikel yang ditulis oleh Anna Yulia Hartanti dan Rofi'atul Andawiyah (2020) dengan judul “Diplomasi Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak TKI di Sabah, Malaysia”. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan konsep *softdiplomacy*. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya dalam pemenuhan hak pendidikan anak-anak PMI di Sabah, Malaysia diantaranya ialah : Pembentukan lembaga pendidikan seperti Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan juga Pusat Pembelajaran Masyarakat yakni CLC yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak PMI dan juga dapat membantu anak-anak PMI untuk melanjutkan pendidikan dengan mendapatkan ijazah formal yang di keluarkan oleh SIKK jika menyelesaikan pendidikan di CLC maupun SIKK. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah proaktif dalam membantu anak-anak PMI dalam masalah dokumentasi hukum seperti pembuatan akta kelahiran dan paspor yang merupakan dokumen-dokumen yang penting dalam mengakses pendidikan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan *softdiplomacy* oleh Pemerintah Indonesia telah efektif

dalam membina kerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk mengatasi masalah pendidikan bagi anak-anak PMI di Sabah, Malaysia¹⁷.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini fokusnya sempit hanya dalam penerapan *softdiplomacy* oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak PMI di wilayah Sabah, Malaysia. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yakni bagaimana *Multi Track Diplomacy* Indonesia dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak PMI. Sehingga, cakupan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebi luas dengan banyaknya aktor dalam diplomasi banyak jalur.

Penelitian yang ketiga yaitu artikel yang ditulis oleh Sultoni Fikri (2022) dengan judul “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kurangnya koordinasi antara pekerja dan berbagai pemangku kepentingan, terutama Kedutaan Besar Indonesia di negara tujuan. Penelitian ini juga menunjukkan banyak kasus diskriminasi dan pelanggaran hak yang dialami oleh WNI yang bekerja di luar negeri, yang mana negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada. Singkatnya, penelitian ini berisi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia (PMI) , menekankan perlunya sistem perlindungan yang lebih baik, koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan,

¹⁷ Anna Yulia Hartati and Rofi'atul Andawiyah, “Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak TKI Di Sabah Malaysia,” *Spektrum* 17, no. 2 (2020).

dan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk menegakkan hak-hak warganya di luar negeri¹⁸.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan hak asasi manusia terhadap para Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi tantangan dengan mengalami banyak kasus diskriminasi yang melanggar hak asasi terhadap para PMI yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yakni lebih spesifik tentang pemenuhan dan perlindungan hak pendidikan bagi anak PMI di Malaysia.

Penelitian yang keempat ialah artikel yang ditulis oleh Regina Rethanovagi dan Rusdiyanta (2018) dengan judul “Penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia melalui *Multi Track Diplomacy* periode 2011-2016”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori Liberalisme dengan konsep politik luar negeri, kepentingan nasional, diplomasi dan *Multi-track Diplomacy*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengatasi masalah TKI ilegal, Indonesia memerlukan pendekatan *multi track diplomacy*. Ini melibatkan kolaborasi antara aktor negara dan organisasi non-pemerintah yakni (LSM) dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Malaysia. Pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, penelitian ini menunjukkan pentingnya

¹⁸ Sultoni Fikri, “*Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022),

melibatkan aktor lain dalam hubungan internasional yang dalam hal ini yakni Organisasi Internasional untuk migrasi (IOM/*International Organization for Migration*), dalam upaya diplomatik untuk mengatasi masalah yang di hadapi oleh para pekerja migran Indonesia¹⁹.

Penelitian ini dan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kesamaan yakni menggunakan konsep *Multi Track Diplomacy* dalam melihat masalah terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sekarang dikenal dengan sebutan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, tentunya keduanya memiliki perbedaan. Pada penelitian ini peneliti fokus pada masalah PMI yang ilegal di Malaysia, bagaimana Indonesia melibatkan aktor-aktor dalam *Multi Track Diplomacy* dalam upaya pemecahan masalah tersebut. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni dengan lebih mempersempit permasalahan yang akan dibahas yaitu terkait dengan peran dari aktor-aktor *Multi Track Diplomacy* dalam upaya yang dilakukan Indonesia untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

¹⁹ Regina Rethanovagi and Rusdiyanta, "Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Di Malaysia Melalui Multi Track Diplomacy Pada Periode 2011 - 2016," *Budi Luhur Jurnal of Contrmporary Diplomacy* 2 (2018).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Multi Track Diplomacy memberikan kontribusi signifikan dalam melindungi dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau oleh diplomasi formal.

1. Melalui jalur pertama (Pemerintah), pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan pemerintah Malaysia melalui forum *Annual Consultation* yang menghasilkan kesepakatan pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), *Community Learning Center (CLC)*, dan *Indonesian Community Center (ICC)*. Pemerintah Indonesia juga mengirimkan guru bina untuk mendukung proses belajar anak-anak PMI di sekolah-sekolah Indonesia dan juga menyalurkan bantuan dana BOS untuk mendukung operasional pendidikan.
2. Pada jalur kedua (non-pemerintah/profesional), organisasi non-pemerintah seperti *HUMANA*, *Sabah Bridge*, NGO PERMAI dan YPPAI aktif memberikan layanan pendidikan di luar pendidikan formal yang diberikan pemerintah. Mereka menjangkau anak-anak PMI di wilayah perkebunan sawit dan menyediakan fasilitas belajar, pelatihan, advokasidan beasiswa repatriasi untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia.

3. Pada jalur keempat (masyarakat sipil), melalui peran guru pamong yang merupakan warga disekitar CLC (baik warga lokal maupun WNA) yang di rekrut oleh perusahaan di sekitar CLC untuk membantu guru bina dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak PMI. Selain menjadi tenaga pendidik, guru pamong juga menjadi agen soail dam kultural yang memperkuat keberlanjutan pendidikan di tengah keterbatasan.
4. Pada jalur kelima (penelitian, pelatihan dan pendidikan), jalur ini berperan melalui kontribusi universitas di Indonesai yang mengirim mahasiswa untuk KKN Internasional dan magang khususnya ke beberapa sanggar bimbingan yang ada di Malaysia. kontribusi ini memperkuat kapasitas pendidikan non-formal dan juga menjaga identitas nasional anak-anak PMI.

Secara keseluruhan, *Multi Track Diplomacy* menjadikan diplomasi Indoesia lebih inklusif dan kolaboortif, yang tidak hanya bergantung pada hubungan antarnegara, tetapi juga melibatkan berbagai aktor non-negara. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memperjuangkan hak pendidikan anak-anak PMI, serta memperlihatkan bahwa perlindungan WNI di luar negeri membutuhkan sinergi dari berbagai jalur diplomasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *Multi Track Diplomacy* Indonesia dalam melindungi hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia diharapkan untuk terus memperkuat jalur diplomasi formal melalui *Annual Consultation*. Pemerintah juga perlu mendorong legalitas lembaga pendidikan seperti Sanggar bimbingan agar diakui secara resmi Pemerintah Malaysia, sehingga anak-anak PMI memiliki akses yang setara terhadap pendidikan. Selain itu, perluasan jangkauan CLC ke wilayah-wilayah perkebunan yang masih minim akses serta peningkatan jumlah dan kualitas guru bina juga sangat diperlukan untuk menunjang kualitas pendidikan.
2. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) seperti HUMANA, Sabah Bridge, PERMAI dan lainnya, diharapkan untuk terus memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang di berikan kepada anak-anak PMI. Perlu juga dilakukan penguatan jejaring kerja sama dengan sekolah mitra di Indonesia.
3. Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia, partisipasi dalam program KKN internasional dan pengabdian masyarakat di Malaysia sangat penting untuk dilanjutkan dan diperluas. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman akademik bagi mahasiswa, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperluas akses pendidikan anak-anak PMI.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut jalur-jalur *Multi Track Diplomacy* lainnya yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aanardianto. "Sanggar Bimbingan PCIM Malaysia Untuk Anak-Anak PMI Beroperasi Kembali." Muahmmadiyah.or.id, 2021. <https://muahmmadiyah.or.id/2021/10/sanggar-bimbingan-pcim-malaysia-untuk-anak-anak-pmi-beroperasi-kembali/>.
- Ahmad Fahrudin, M.Si. "Merajut Asa Pendidikan Anak Pekerja Imigran Indonesia Di Malaysia (Bagian Kedua)." Universitas PTIQ Jakarta, 2024. <https://ptiq.ac.id/2024/08/20/merajut-asa-pendidikan-anak-pekerja-imigran-indonesia-di-malaysia-bagian-kedua/>.
- Alfatoun. "Partner of the Week: Humana Child Aid Society Sabah." Alfatoun, 2024. <https://aflatoun.org/latest/news/partner-of-the-week-humana-child-aid-society-sabah/>.
- Amin, Asma, Danar Hafidz Adi Wardhana, and Riady Ibnu Khaldun. *Pengantar Multi Track Diplomacy*, 2023.
- Aranda, Rafli Jassika, and Nurhimiliah. "Tanggung Jawab Kedutaan Republik Dalam Mengakomodasi Pendidikan Anak Jawab Pekerja Besar Migran Indonesia Di Malaysia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 13544–52.
- Bank Indonesia, BNP2TKI. "Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia V . 30 . Number Of Indonesian Migrant Workers (IMWs) By Host Country (Thousands of People) Statistik Ekonomi Dan Keuangan," 2023, 180–81. https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf.
- Basrowi, Basrowi. "Pemanfaatan Media Ssosial Oleh Tenaga Kerja Indonesia Dalam Proses Pendidikan Anak Menggunakan Metode Belajar Long Distance Relationship." *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 13, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v13i1.59>.
- BP2MI. "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Maret 2024." BP2MI, 2024. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-maret-2024>.
- Center, Community Learning. "Layanan Pendidikan Community Learning Center (CLC) Di Wilayah Sabah Dan Sarawak, Malaysia." Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, 2022. <https://silnkotakinabalu.sch.id/wp-content/uploads/2022/11/Web-footer-3.png>.
- CNN Indonesia. "Rangkuman Sejarah Konfrontasi Indonesia Malaysia Pada 1963-1966." CNN Indonesia, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240718102435-569-1122660/rangkuman-sejarah-konfrontasi-indonesia-malaysia-pada-1963-1966>.

- Damayanti, Christy, Untari Narulita Madyar Dewi, and Defta Galuh Permatasari. "Diplomasi Pendidikan Sabah bridge Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indoneisa di Sabah, Malaysia." *Indonesian Journal of International Relations* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.440>.
- Darwis, Anita, and Aswin Baharuddin. "Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI Di Negeri Sabah." *Hasanuddin Journal of International Affairs*. Vol. 1, 2021.
- DataIndonesia, and BP2MI. "Kumpulan Data Pekerja Migran Indonesia Pada 2024," January 2025. <https://assets.dataindonesia.id/2025/01/22/1737537462393-88-PPT-Report-Kumpulan-Data-Pekerja-Migran-Indonesia-pada-2024.pdf>.
- Diamond, Louise, and John McDonald. "Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace Third Edition." *Kumarian Pres* 3, no. 2003 (1996).
- Dian, Sari. "Perjuangan Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Di Sabah." *Kumparan.com*, 2019. <https://kumparan.com/sari-dian/perjuangan-mendapatkan-pendidikan-bagi-anak-pekerja-migran-di-sabah-1sJkmrrt5cs/3>.
- Fauzi, Nasrullah Ali. "Layanan Pendidikan Indonesia, Berlomba Mengejar Cita Raih Masa Depan Gemilang." *Kemendikbud.go.id*, 2024. <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2024/05/layanan-pendidikan-indonesia-berlomba-mengejar-cita-raih-masa-depan-gemilang>.
- feb.uinjkt. "KKN Internasional Di Malaysia: Berdayakan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia." *feb.uinjkt.ac.id*, 2024. <https://feb.uinjkt.ac.id/id/kkn-internasional-di-malaysia-berdayakan-anak-anak-pekerja-migran-indonesia>.
- Fikri, Sultoni. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.255>.
- Habibah, Siti Nur. "Upaya Sabah Bridge Dalam Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah," 2023.
- Hartati, Anna Yulia, and Rofi'atul Andawiyah. "Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak TKI Di Sabah Malaysia." *Spektrum* 17, no. 2 (2020).
- Homans, Charles. "Track II Diplomacy: A Short History." *Foreign Policy*, 2011, 187.
- Humas UPNVJ. "Optimalisasi Pendidikan Anak Indonesia Melalui Program KKN Di Kuala Lumpur." *upnvj.ac.id*, 2023. <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2023/12/optimalisasi-pendidikan-anak-indonesia-melalui-program-kkn-di-kuala-lumpur.html>.
- Husain, Sarkawi B., Lina Puryanti, and Adi Setijowati. "History, Education, and Border Area: An Introduction Study on Education at the Indonesia-Malaysia

- Border, Sebatik Island, North Kalimantan.” *Kasetsart Journal of Social Sciences* 42, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.4.31>.
- Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. “Pelepasan 7 Mahasiswa KKN Internasional Di Malaysia.” ahmaddahlan.ac.id, 2023. <https://www.ahmaddahlan.ac.id/kkn-internasional-malaysia/>.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. “Kerja Di Luar Negeri? Pastikan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Yang Prosedural.” Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, 2020. <https://kanibatam.kemenumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural>.
- Kemendikbud. “70 Siswa Siap Jalani Program ADEM Repatriasi Gema Citra 2024 Di Banten.” Kemendikbud.go.id, 2024. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/08/70-siswa-siap-jalani-program-adem-repatriasi-gema-citra-2024-di-banten>.
- KSM. “Atdikbud KBRI Kuala Lumpur Kunjungi Lokasi KKN Internasional Unsoed Di Malaysia.” AntaraJateng, 2024. <https://jateng.antaranews.co/berita/522453/atdikbud-kbri-kuala-lumpur-kunjungi-lokasi-kkn-internasional-unsoed-di-malaysia>.
- Kurniasih, Augustina. “Sosialisasi Manajemen Risiko Untuk Keberlanjutan UMKM TKI Di Pulau.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia* 2, no. 4 (2024): 457–66. <https://doi.org/10.54082/jpmii.510>.
- Kusnandar, Budy Viva. “Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Menurun Sejak Pandemi.” databoks.katadata.co.id, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/2d2aaaa6c139913/pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-menurun-sejak-pandemi>.
- Laily, Ifitah Nurul. ““Pengertian Penelitian Deskriptif; Ciri-Ciri; Jenis; Dan Pelaksanaannya.”” *Katadata*, 2022.
- Limanseto, Haryo. “Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Optimalkan Program Government to Government.” Ekon.Go.id, 2022.
- Mahfud, Mahdi Achmad. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” 2014.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.” *PT Remaja Rosdakarya*, 2018.
- Mufida, Saleha. “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Masalah Pendidikan Anak TKI Di Serawak Periode 2014-2018.” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah*, 2018.
- Muyamin, Muhammad. “Peran Aktif NGO Humana Dalam Memfasilitasi Pendidikan Anak-Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Sabah Malaysia.”

- Indonesian Perspective* 4, no. 2 (2019): 100–117.
<https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26703>.
- Novia, H. “Dinamika Diplomasi Indonesia Terkait Pemenuhan Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sarawak Malaysia.” *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 15, no. 2 (2023).
- Novia, Hana. “Upaya-Upaya Diplomasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Kuala Lumpur Melalui Community Learning Center (CLC) Dalam Memberikan Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI),” 2020.
- Patoni, Ahmad, and H Muhammad. “Kebijakan Pendidikan Di Malasia Ahmad Patoni, 1 H. Muhammad 2 1.” *Jurnal Pendidikan Malaysia* 3-5–2022 (2022): 1–18.
- Permai Penang. “Sanggar Bimbingan PERMAI.” permai.my.id, n.d.
<https://permai.my.id/elementor-170/>.
- Prasanti, Anggia, Yasmin Aathirah, and Belardo Prasetya Mega. “Upaya Dan Hambatan Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI) Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia.” *Waqafilmunusantara.Com*, n.d.
- PSGD UNIDA. “Pengabdian Masyarakat Di Sanggar Belajar Kampung Bharu, Malaysia.” Unida, 2024.
<https://faipg.unida.ac.id/pgsd/artikel/pengabdian-masyarakat-di-sanggar-belajar-kampung-bharumalaysia>.
- Putra Santoni, Fathan. “Labor Economics: Pekerja Migran Indonesia: Problematika Pahlawan Devisa Negara,” 2024.
<https://microdashboard.feb.ugm.ac.id/kajian-vol-6-labor-economics-pekerja-migran-indonesia-problematika-pahlawan-devisa-negara/>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya (2012).
- Rethanovagi, Regina, and Rusdiyanta. “Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Di Malaysia Melalui Multi Track Diplomacy Pada Periode 2011 - 2016.” *Budi Luhur Jurnal of Contrmporary Diplomacy* 2 (2018).
- Sahureka, Danil. “Relasi Sosial NGO PERMAI Dalam Pemenuhan Pendidikan Terhadap Anak Migran Yang Tidak Berdokumen Di Pulau Pinang Malaysia.” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 3, no. 1 (2023): 104–12.
<https://doi.org/10.58192/populer.v3i1.1707>.
- Sakti, Lanang, Ni Wayan Sridiani, Heri Dudiatman, Universitas Bumigora, and Universitas Gunung Rinjani. “Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri.” *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*

7 (2024): 90–104.

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. “Layanan Pendidikan Community Learning Center (CLC) Di Wilayah Sabah Dan Sarawak, Malaysia.” Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Accessed April 23, 2025. <https://silnkotakinabalu.sch.id/community-learning-center-clc/>.

Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. “Sejarah SIKL.” Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Accessed April 18, 2025. <https://sekolahindonesia.edu.my/web2/sejarah-sikl/>.

Setiawan, Agus. “Sanggar Bimbingan Permai Penang Diresmikan.” Antara News, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2134930/sanggar-bimbingan-permai-penang-diresmikan>.

Shanisse. “Pengembangan Komunitas - Indonesia Community Centre (ICC).” elshaddai, 2023. <https://ecb.org.my/2023/12/29/community-development-indonesian-community-centre-icc/>.

Sulistya Handoyo, Budi, and Reza Triarda. “Problematika Pendidikan Di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia.” *Transformasi Global* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.02.2>.

The Centre for Child Rights and Business. “MY Voice Child Labour Case Manager Training Kicks Off in Sabah with Humana Child Aid Society Sabah.” The Centre For Child Rights and Business, 2024. <https://www.childrights-business.org/impact/my-voice-child-labour-case-manager-training-kicks-off-in-sabah-with-humana-child-aid-society>.

Tim Redaksi Caraka Buka Mata dan Buka Hati. “Profil Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur.” *Kemlu.Go.Id*, 2023. <https://kemlu.go.id/kualalumpur/id>.

Trading Economics. “Indonesia Remittances.” Trading Economics, 2024. <https://tradingeconomics.com/indonesia/remittances>.

Utami, Larasi Dyah. “Indonesia Community Center, Wadah Interaksi Dan Edukasi Anak-Anak WNI Di Malaysia.” *Tribunnews.com*, 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/18/indonesian-community-center-wadah-interaksi-dan-edukasi-anak-anak-wni-di-malaysia>.

Windary, Shylvia. “Kontribusi Non-Government Organization (NGO) Dalam Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Sabah.” *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 5, no. 2 (2022): 115–28. <https://doi.org/10.23969/transborders.v5i2.5916>.